



Gerakan Sosial Baru di Kota Santri: Analisis Pandangan Gerakan Aliansi Aktivis dan Masyarakat Muslim Tasikmalaya (Almumtaz) Terhadap Ruang Bermusik 2025

Muhammad Nurfikri¹, Nisa Khoerunisa¹, Faisal Fadilla Noorikhshan^{1*}

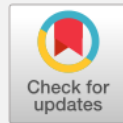
¹ Jurusan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi, 46115, Tasikmalaya-Indonesia

*Korespondensi: faisal.fadilla@unsil.ac.id

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Research Article



Tanggal Terbit:

31 Maret 2026



Artikel dengan akses terbuka

Hak Cipta© 2026 dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Journal of Politics and Democracy

Lisensi: Attribution-Non Commercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)

Cantuman Sitasi:

Nurfikri, M., Khoerunisa, N., & Noorikhshan, F. F. (2026). Gerakan Sosial Baru di Kota Santri: Analisis Pandangan Gerakan Aliansi Aktivis dan Masyarakat Muslim Tasikmalaya (Almumtaz) Terhadap Ruang Bermusik 2025. *Journal of Politics and Democracy*, 5(2), 96-107.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dinamika gerakan sosial keagamaan Almumtaz dalam polemik pembatalan penampilan sejumlah musisi pada konser Ruang Bermusik 2025 di Kota Tasikmalaya. Fokus utama kajian ini adalah bagaimana Almumtaz beroperasi sebagai aktor gerakan sosial serta bagaimana identitas "Kota Santri" dimaknai, dipertahankan, dan dinegosiasikan dalam ruang publik kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui teknik wawancara mendalam, observasi non-partisipan, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan dengan merujuk pada teori gerakan sosial Sidney Tarrow dan konsep identitas kolektif Porta dan Diani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Almumtaz mengartikulasikan aksi kolektif berbasis nilai religius sebagai strategi untuk menantang ekspresi budaya populer yang dianggap tidak sejalan dengan norma keagamaan lokal. Identitas "Kota Santri" tidak hanya berfungsi sebagai simbol kultural, tetapi juga sebagai instrumen politik yang dilembagakan melalui regulasi daerah untuk mengontrol ruang publik. Selain itu, Almumtaz berhasil membangun solidaritas melalui transformasi narasi historis pesantren dan otoritas ulama menjadi identitas kolektif yang dinamis. Temuan ini menegaskan bahwa gerakan sosial keagamaan di tingkat lokal memiliki kapasitas signifikan dalam memengaruhi kebijakan, membentuk batas ekspresi budaya, serta mereproduksi politik identitas dalam konteks perubahan sosial.

Abstract

This study examines the dynamics of the Almumtaz religious



<https://doi.org/10.61183/polikrasi.v5i1.185>

social movement in the controversy surrounding the cancellation of several performers in the Ruang Bermusik 2025 concert in Tasikmalaya. It focuses on how Almumtaz operates as a social movement actor and how the "City of Santri" identity is constructed, maintained, and negotiated within the contemporary public sphere. This research employs a qualitative approach with a case study design, utilizing in-depth interviews, non-participant observation, and document analysis. The analytical framework draws on Sidney Tarrow's social movement theory and Porta and Diani's concept of collective identity. The findings reveal that Almumtaz mobilizes collective action rooted in religious values to challenge forms of popular culture perceived as inconsistent with local religious norms. The "City of Santri" identity functions not only as a cultural symbol but also as a political instrument institutionalized through local regulations to regulate public space. Furthermore, Almumtaz constructs a dynamic collective identity by transforming historical narratives of Islamic boarding schools and religious authorities into a source of social solidarity. This study highlights that local religious movements possess significant capacity to influence policy, shape the boundaries of cultural expression, and reproduce identity politics in the context of contemporary social change.

Kata Kunci Almumtaz, Gerakan Sosial Baru, Identitas Kolektif, Kota Santri

1. Pendahuluan

Pada tanggal 19 dan 20 Juli 2025 diselenggarakan sebuah konser musik bertajuk Ruang Bermusik 2025 yang digelar di Lanud Wiriadinata Kota Tasikmalaya. Konser ini menghadirkan berbagai musisi nasional seperti Maliq & D'Essentials, Wisnu Santika, Adnan Veron x HBRP, Perunggu, Nadin Amizah, Hindia, Lomba Sihir, dan Feast. Namun, penyelenggaraan konser tersebut menuai penolakan tegas dari organisasi masyarakat Islam yang tergabung dalam Aliansi Aktivistis dan Masyarakat Muslim Tasikmalaya (Almumtaz) yang menentang rencana penampilan tiga grup musik Hindia, Lomba Sihir, dan Feast. Penolakan tersebut didasarkan pada tuduhan bahwa grup musik ini membawa simbolisme dan pemahaman seperti indikasi satanik dan simbol-simbol yang dianggap melanggar syariat yang dinilai bertentangan dengan identitas dan nilai-nilai keislaman dan kesantian yang melekat pada Kota Tasikmalaya (KOMPAS.com, 2025).

Ketua Almumtaz Hilmi Afwan menyampaikan bahwa pihaknya menolak secara terbuka rencana penyelenggaraan konser tersebut karena dinilai mengandung unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan masyarakat Kota Tasikmalaya. Sikap penolakan Almumtaz didasari oleh kekhawatiran terhadap potensi pengaruh simbolik dan ideologis yang dipandang dapat mengancam nilai-nilai religius masyarakat Tasikmalaya (Detikpop, 2025). Ketua Almumtaz juga menyatakan bahwa penggalan lirik "Ku doakan kita semua masuk neraka" dari lagu Matahari Tenggelam oleh musisi Hindia dinilai bertentangan dengan nilai-nilai religius

dan mempertanyakan maknanya secara mendalam di berbagai media sosial. (News Tasikmalaya, 2025).

Kehadiran grup band Hindia di Kota Tasikmalaya bukanlah menjadi sesuatu yang baru, Pada 10 September 2023 Hindia pernah menjadi salah satu pengisi acara musik Now Playing Festival bersama Clun Racun Dangdut yang diselenggarakan di Lapangan Parkir Transmart. Kehadiran tersebut kala itu berlangsung tanpa penolakan berarti dari masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa ruang ekspresi musik populer masih dapat diterima di tengah kultur religius Kota Tasikmalaya. Situasi yang berbeda terjadi pada tahun 2025, penampilan Hindia dalam konser Ruang Bermusik 2025 justru mendapatkan penolakan dari organisasi masyarakat islam yang tergabung dalam Almumtaz (Kabar Priangan, 2025).

Penyelenggara Konser Ruang Bermusik 2025 Rizki Ginanjar Saputra menjelaskan bahwa tuduhan mengenai keterkaitan grup musik Hindia dengan unsur satanisme tidak memiliki dasar yang dapat dibenarkan secara faktual. Tuduhan tersebut telah berulang kali dibantah secara terbuka oleh Daniel Baskara Putra melalui berbagai media nasional dan podcast populer. Isu tersebut berawal dari kesalahpahaman terhadap aksi panggung Hindia pada peluncuran album Lagi Pula Hidup Akan Berakhir tahun 2023 pada lagu Matahari Terbenam yang ditafsirkan sebagian pihak sebagai simbol pemujaan setan (Times Indonesia, 2025).

Upaya mediasi terkait penyelenggaraan konser Ruang Bermusik 2025 dilakukan melalui serangkaian rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Moh. Faruk Rozi yang menegaskan bahwa kewenangan pemberian izin konser berada pada Polda Jawa Barat sementara Polres Tasikmalaya Kota hanya berperan memberikan rekomendasi. Dalam prosesnya, telah dilakukan empat kali pertemuan yang melibatkan tokoh agama, elemen masyarakat, ketua MUI Kota Tasikmalaya, alim ulama, pimpinan ormas islam, pihak penyelenggara, serta perwakilan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Hasil dari musyawarah tersebut kemudian disampaikan kepada Polda Jawa Barat sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan kelanjutan izin pelaksanaan konser (Times Indonesia, 2025).

Dengan mempertimbangkan dari hasil mediasi tersebut pada akhirnya penampilan Hindia, Lomba Sihir, dan Feast pada Ruang Bermusik 2025 tidak dapat dilaksanakan. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan dinamika yang berkembang serta berbagai faktor yang berkaitan dengan penyelenggaraan acara. Pihak panitia menyadari tingginya antusiasme audiens untuk menyaksikan ketiga musisi tersebut sekaligus memahami bahwa ekspektasi tersebut merupakan bentuk dukungan nyata terhadap perkembangan ekosistem musik di daerah (Detikjabar, 2025).

Menanggapi dinamika tersebut, muncul beragam reaksi dari elemen masyarakat seperti Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Tasikmalaya Ardiana Nugraha yang menyoroti akar persoalan terkait polemik konser musik tidak sepenuhnya bersumber dari kebijakan eksekutif melainkan berakar pada salah satu produk hukum yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya yakni Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Nilai (DPRD Kota Tasikmalaya, 2020). Perda tersebut dinilai menjadi instrumen yang berimplikasi pada pembatasan ruang ekspresi publik, khususnya bagi generasi muda dan pelaku seni. Hal ini terjadi karena Perda Tata Nilai memiliki ruang tafsir yang terlalu luas sehingga kerap dijadikan legitimasi untuk membatasi aktivitas seni dan budaya atas dasar moralitas atau norma sosial (Priangan.com, 2025).

Respon lain disampaikan oleh Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kota Tasikmalaya Bubung Nizar yang menyampaikan bahwa keberagaman ekspresi budaya dan kreativitas generasi

muda merupakan bagian dari dinamika sosial yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dituntut untuk mampu mengelola keragaman tersebut secara arif, sehingga ruang-ruang kreativitas tidak serta-merta dibatasi dengan dalih moralitas semata. Kemudian dialog dan musyawarah perlu dikedepankan sebagai mekanisme penyelesaian perbedaan dibandingkan dengan pendekatan pelarangan yang justru berpotensi menimbulkan ketegangan sosial (Times Indonesia, 2025).

Dinamika tersebut menunjukkan adanya jurang pemisah antara gerakan sosial yang berupaya menjaga kemurnian identitas religius kota dengan realitas berkembangnya industri kreatif dan kebebasan berekspresi budaya populer yang digandrungi oleh generasi muda, yang dalam kasus ini berujung pada pencoretan Hindia, Feast, dan Lomba Sihir dari daftar penampil setelah melalui proses mediasi, sehingga menjadi titik krusial untuk melihat bagaimana identitas kota dinegosiasikan, dipertahankan, dan bahkan diperebutkan dalam ruang publik kontemporer. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari karakter Kota Tasikmalaya sebagai “Kota Santri” yang memiliki basis keislaman kuat, tercermin dari tingginya jumlah pesantren yang mencapai 278 lembaga dengan 23.965 santri dan 2.530 pengajar yang tersebar di 10 kecamatan (Badan Pusat Statistik, 2024), yang berperan dalam membentuk ulama, ustadz, dan aktor-aktor keagamaan yang memengaruhi norma sosial masyarakat. Dalam konteks ini, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan, tetapi juga sebagai fondasi pelestarian nilai religius serta pusat pembentukan nilai sosial, moral, dan keagamaan yang mengakar dalam kehidupan sehari-hari, sehingga membentuk cara pandang masyarakat dalam merespons dinamika sosial, termasuk terhadap penetrasi budaya populer di ruang publik (Mujahidin, 2021; Azhar dan Haryanto, 2024).

Dalam konteks inilah Almumtaz merasa memiliki legitimasi moral untuk mengambil sikap tegas terhadap penyelenggaraan konser Ruang Bermusik 2025. Dalam konser Ruang Bermusik 2025 Almumtaz tampil sebagai aktor yang menyuarakan penolakan terhadap grup musik Hindia, Lomba Sihir, dan Feast dengan alasan adanya simbolisme dan nilai yang dianggap tidak sejalan dengan identitas religius kota. Kehadiran gerakan ini menimbulkan respon beragam, disatu sisi dipandang sebagai upaya menjaga nilai-nilai kesantrian, namun di sisi lain juga memperlihatkan adanya perbedaan orientasi dengan sebagian generasi muda yang lebih terbuka pada ekspresi budaya populer. Situasi ini memperlihatkan dinamika sosial yang kompleks, dimana nilai religius yang telah lama melekat berinteraksi dengan perkembangan gaya hidup serta preferensi kultural masyarakat kontemporer.

Dalam perkembangannya, Almumtaz menunjukkan pola gerakan sosial yang berangkat dari basis keagamaan sekaligus mengakar kuat pada kultur lokal Tasikmalaya. Sebagai aliansi lintas organisasi, gerakan ini tidak hanya terbatas pada konsolidasi internal, tetapi juga aktif mengartikulasikan sikap terhadap berbagai isu sosial, politik, dan keagamaan di ruang publik. Karakteristik tersebut tercermin dari konsistensi mereka dalam menempatkan nilai-nilai syariat Islam dan identitas “Kota Santri” sebagai pijakan utama dalam setiap mobilisasi (Hamim, 2021). Dalam konteks polemik Konser Ruang Bermusik 2025, eksistensi Almumtaz tidak dapat dilepaskan dari ruang sosial dan kultural yang telah lebih dahulu membentuknya, di mana nilai-nilai religius yang mengakar dalam masyarakat menjadi sumber legitimasi sekaligus basis resonansi gerakan.

Konsolidasi lintas ormas Islam yang dilakukan Almumtaz bukan sekadar forum koordinasi, melainkan representasi dari kesadaran kolektif yang tumbuh dari tradisi religius masyarakat Tasikmalaya. Gerakan ini lahir dari struktur sosial yang telah menginternalisasi norma, simbol,

dan nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari, sehingga isu yang mereka bawa kerap dipandang selaras dengan aspirasi publik (Hamim, 2021). Fenomena ini sejalan dengan temuan dalam studi gerakan sosial sebelumnya, seperti Aksi Bela Islam 212 yang menunjukkan bagaimana identitas kolektif berbasis agama dapat dibentuk melalui framing isu tertentu dan dimobilisasi menjadi kekuatan politik yang signifikan (Riadi dan Drajat, 2019). Dengan demikian, Almumtaz dapat dipahami sebagai bagian dari pola gerakan yang lebih luas, di mana identitas religius tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga instrumen strategis dalam membangun solidaritas dan memengaruhi dinamika sosial-politik. Penelitian mengenai Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran (ITP) yang menunjukkan bahwa gerakan ini berhasil membangun identitas kolektif anti-pacaran melalui tiga mekanisme penting. Pertama, ITP membentuk identitas “kita” sebagai pejuang hijrah dan penjaga kehormatan, sehingga anggota merasa memiliki tujuan bersama yang bernilai religius. Kedua, interaksi yang terjalin di media sosial melalui kampanye, diskusi, dan konten motivatif memperkuat rasa kebersamaan serta solidaritas di antara para pengikutnya. Ketiga, pengalaman masa lalu yang penuh penyesalan atau keinginan memperbaiki diri menjadi ikatan emosional yang mendorong mereka untuk aktif terlibat dalam gerakan. Melalui tiga cara tersebut, ITP berhasil menciptakan kesadaran kolektif yang kuat dan memotivasi aksi bersama melawan praktik pacaran (Rosyidah dan Damastuti, 2023).

Penelitian mengenai gerakan sosial selama ini cenderung berfokus pada gerakan berskala besar dengan pengaruh luas, terutama yang menyoroti peran organisasi keagamaan dalam menggunakan identitas agama sebagai basis aksi sosial, penegakan nilai moral, dan pembangunan legitimasi di ruang publik, sementara pada level lain komunitas lokal juga memanfaatkan pola komunikasi tertentu untuk mempertahankan eksistensi dan akses terhadap sumber daya di tengah perubahan sosial. Dalam konteks polemik Ruang Bermusik 2025, pembatalan sejumlah penampil membuka ruang analisis yang lebih spesifik terkait bagaimana gerakan sosial keagamaan di tingkat lokal beroperasi, khususnya dalam menggunakan nilai-nilai religius sebagai legitimasi tindakan kolektif serta kemampuannya memengaruhi kebijakan dan dinamika sosial politik di tingkat kota. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menelusuri kemunculan gerakan Almumtaz dengan menempatkan identitas religius Kota Tasikmalaya sebagai basis kekuatan gerakan, sekaligus menganalisis bagaimana identitas “Kota Santri” dimaknai, dipertahankan, dan dinegosiasikan dalam ruang publik kontemporer ketika berhadapan dengan ekspresi budaya populer dan perubahan sosial generasi muda, termasuk bagaimana narasi berbasis simbol dan sejarah budaya digunakan untuk membangun loyalitas kolektif serta merespons tekanan globalisasi antara adaptasi dan resistensi terhadap gaya hidup modern.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam dinamika gerakan sosial Almumtaz dalam polemik konser Ruang Bermusik 2025 di Kota Tasikmalaya. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna, perspektif, dan konstruksi sosial yang berkembang di antara aktor-aktor yang terlibat dalam suatu fenomena (Creswell, 2009). Sementara itu, desain studi kasus digunakan untuk menelaah fenomena secara kontekstual dan mendalam dalam batasan ruang dan waktu tertentu (Yin, 2018). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipan, dan studi dokumentasi terhadap arsip, pemberitaan

media, serta dokumen organisasi. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan relevansi peran, meliputi unsur internal Almumtaz dari tingkat pimpinan hingga anggota, serta informan eksternal seperti akademisi guna memperoleh sudut pandang yang lebih komprehensif.

Analisis data dilakukan secara sistematis sejak tahap pengumpulan data dengan menekankan pada proses reduksi, kategorisasi, dan interpretasi untuk menemukan pola-pola makna yang relevan dengan fokus penelitian (Sujarweni, 2025). Proses ini bersifat iteratif dan berlangsung secara terus-menerus hingga diperoleh kesimpulan yang kredibel dan terverifikasi (Flick, 2018). Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan dokumen yang berbeda. Penelitian dilaksanakan pada periode November 2025 hingga Februari 2026 di Kota Tasikmalaya sebagai lokasi utama karena merupakan basis aktivitas gerakan Almumtaz sekaligus ruang sosial tempat berlangsungnya interaksi antara identitas religius “Kota Santri” dan dinamika budaya populer generasi muda.

3. Hasil dan Pembahasan

Aliansi Aktivistis dan Masyarakat Muslim Tasikmalaya (Almumtaz) mulai muncul di panggung sosial keagamaan Kota Tasikmalaya sejak tahun 2014. Secara organisatoris, aliansi ini resmi dideklarasikan pada tanggal 1 Juli 2014, yang diinisiasi oleh para aktivis muda dari berbagai lintas organisasi Islam di Tasikmalaya. Ke 21 organisasi kemasyarakatan tersebut diantaranya Unsur organisasi kemasyarakatan (Ormas) besar dan lembaga keagamaan yang menjadi pilar aliansi ini meliputi Persatuan Islam (Persis), PUI (Persatuan Umat Islam), serta DPW FPI (Front Pembela Islam) Tasikmalaya. Di samping itu, terdapat pula keterlibatan lembaga yang fokus pada pengawasan dan pemikiran seperti Lembaga Pengawasan dan Pengembangan Umat (LPPU), Majelis Mujahidin, dan Jamaah Ansharusy Syariah (JAS). Sinergi ini juga diperkuat oleh kelompok-kelompok kajian dan forum silaturahmi seperti Forum Pengajian Imam Syafi’i, Forsil, serta Majelis Ilmu Al Fathonah (Hamim, 2021).

Dilihat dari unsur kelompok pembentuk pada awal dideklarasikannya, Almumtaz merepresentasikan sebuah gerakan yang terbagi ke dalam dua kategori utama, yakni organisasi yang memiliki afiliasi nasional dan organisasi yang bersifat lokal kedaerahan. Kategori pertama mencakup cabang-cabang dari organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam besar berskala nasional seperti Persatuan Islam (Persis), Persatuan Umat Islam (PUI), Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin, hingga Jamaah Ansharusy Syariah (JAS), yang memberikan bobot legitimasi struktural serta jaringan ideologi dari tingkat pusat. Sementara itu, kategori kedua terdiri dari entitas-entitas berbasis lokal di Tasikmalaya seperti Lembaga Pengawasan dan Pengembangan Umat (LPPU), Forum Pengajian Imam Syafi’i, Forsil, serta Majelis Ilmu Al Fathonah.

Kelompok-kelompok yang tergabung dalam pendirian Almumtaz memiliki watak konservatif yang ditandai dengan kecenderungan menolak penafsiran modern, liberal, maupun progresif terhadap ajaran Islam, serta berpegang teguh pada doktrin agama dan tatanan sosial yang telah mapan. Orientasi ini tercermin dalam cara pandang mereka yang menempatkan syariat Islam sebagai fondasi utama pergerakan, yang kemudian diaktualisasikan melalui doktrin amar ma’ruf nahi munkar. Komitmen ideologis tersebut dipersatukan oleh visi kolektif untuk menegakkan syariat, memperkuat solidaritas umat, serta menjaga identitas religius

masyarakat Kota Tasikmalaya melalui berbagai bentuk mobilisasi sosial (Hamim, 2021; Mudzakkir, 2017).

Secara terminologis, amar ma'ruf merepresentasikan segala bentuk kebajikan yang mendatangkan ketenangan jiwa serta selaras dengan rida Allah SWT. Sebaliknya, nahi munkar didefinisikan sebagai segala tindakan yang secara naluriah ditolak oleh jiwa dan secara objektif dinilai buruk, baik berdasarkan parameter syariat maupun pertimbangan akal sehat. Dalam cakupan yang lebih luas, kemungkaran mencakup seluruh perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam (syari'ah). Oleh karena itu, penggabungan kedua konsep ini secara etimologis bermuara pada upaya kolektif untuk melarang perbuatan durhaka serta segala bentuk pelanggaran aturan guna menjaga integritas nilai-nilai agama di tengah masyarakat (Hamim, 2021). Gerakan Almumtaz memiliki fokus program yang dirancang untuk merespons dinamika zaman melalui pendekatan yang bersifat restoratif, yakni berupaya mengembalikan tatanan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam atau mempertahankannya. Dengan struktur organisasi yang taktis, setiap program kerja diarahkan untuk memperkuat identitas kota santri sekaligus menjadi instrumen kontrol sosial terhadap fenomena yang dianggap dapat merusak moralitas publik.

Dakwah Amar Makruf menjadi pilar utama dalam membangun fondasi pemikiran dan kesadaran umat secara persuasif. Fokus ini diwujudkan melalui penguatan literasi keagamaan, penyelenggaraan kajian rutin, dan ajakan-ajakan positif untuk kembali pada nilai-nilai ibadah yang murni. Hisbah Nahyi Munkar merupakan manifestasi dari ketegasan gerakan dalam memitigasi kemaksiatan dan segala bentuk penyimpangan sosial di ruang publik. Program ini berfokus pada pengawasan, advokasi, hingga aksi protes terhadap kegiatan-kegiatan yang dianggap bertentangan dengan norma agama dan kearifan lokal, seperti kasus penolakan Hindia pada Ruang Bermusik 2025. Sosial Kemasyarakatan mencerminkan sisi humanis Gerakan Almumtaz yang hadir sebagai jembatan kemanusiaan bagi warga yang membutuhkan. Fokus ini tidak terbatas pada retorika keagamaan semata, melainkan menyentuh aksi nyata seperti penyaluran bantuan logistik, santunan bagi kaum duafa, hingga tanggap bencana alam. Solidaritas Dunia Islam menjadi perwujudan dari konsep Ukhuwah Islamiyah yang melampaui batas-batas teritorial negara. Fokus ini diarahkan pada pembangunan kesadaran kolektif mengenai kondisi umat Islam global, khususnya dalam memberikan dukungan moral maupun material bagi perjuangan rakyat Palestina dan wilayah konflik lainnya. Melalui kampanye kemanusiaan dan aksi massa internasionalisme, Gerakan Almumtaz ingin menegaskan bahwa masyarakat Tasikmalaya merupakan bagian integral dari tubuh umat Islam dunia yang ikut merasakan penderitaan saudara seiman di belahan bumi lain.

Solidaritas Dunia Islam yang diusung oleh Gerakan Almumtaz merupakan manifestasi nyata dari aktivisme Islam yang berakar kuat pada simbol, bahasa, dan sejarah budaya masyarakat Muslim, di mana konsep Ukhuwah Islamiyah digunakan sebagai narasi untuk membangun resonansi emosional di tengah umat yang merasa terpinggirkan secara politik global sesuai dengan yang dikemukakan oleh Wiktorowicz (2007). Dengan mengangkat isu Palestina dan wilayah konflik lainnya, gerakan ini tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga membangun kerangka berpikir yang mampu memotivasi dan menumbuhkan loyalitas pengikutnya melalui identitas kolektif sebagai bagian integral dari umat Islam dunia. Hal ini membuktikan bahwa meskipun beroperasi dalam dinamika lokal yang penuh tekanan,

strategi Almumtaz dalam menciptakan internasionalisme dari Tasikmalaya merupakan bentuk perlawanan terhadap kehilangan kendali atas perubahan global.

Secara keseluruhan, keempat fokus program tersebut menunjukkan bahwa Gerakan Almumtaz memiliki orientasi yang komprehensif, mulai dari pembinaan internal individu melalui dakwah, hingga keterlibatan dalam isu-isu global. Sinkronisasi antara aspek spiritual, kontrol sosial, kepedulian kemanusiaan, dan solidaritas internasional menjadikan gerakan ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk opini dan kebijakan di Kota Tasikmalaya. Dalam Konteks Ruang Bermusik 2025, penggunaan teori gerakan sosial modern hadir dengan perspektif yang lebih segar melalui empat karakteristik utamanya. Pertama, teori ini memandang gerakan sosial sebagai bentuk aksi kolektif yang rasional dan terencana, bukan sekadar luapan emosi irasional dari massa. Kedua, terdapat upaya rekontekstualisasi yang menyempurnakan teori-teori klasik agar tetap relevan dalam membedah fenomena sosial masa kini. Ketiga, kajian ini telah meluas secara global melalui berbagai riset empiris di luar wilayah Barat, sehingga menghasilkan sudut pandang yang lebih inklusif. Terakhir, teori modern secara tajam mampu memetakan faktor-faktor penentu yang memengaruhi kemunculan, kekuatan, hingga tingkat keberhasilan suatu gerakan dalam mencapai tujuannya (Situmorang, 2013).

Gerakan sosial merupakan bentuk perlawanan politik yang lahir dari masyarakat melalui konsolidasi kekuatan oleh pihak-pihak berpengaruh demi mencapai tujuan bersama. Aksi ini secara spesifik ditujukan untuk menentang kelompok elit, pemegang kekuasaan, atau aktor lain yang dianggap dapat mengganggu stabilitas serta tatanan sosial yang telah mapan (Tarrow, 1993; Damantu dan Arief, 2025). Berdasarkan perspektif Sidney Tarrow, keterlibatan Almumtaz dalam merespons konser Ruang Bermusik 2025 menunjukkan sebuah gerakan yang terorganisir untuk menjaga batas-batas identitas lokal. Penolakan terhadap Hindia dan Lomba Sihir bukan sekadar masalah selera musik, melainkan sebuah aksi kolektif yang melihat kehadiran mereka sebagai ancaman terhadap tatanan nilai.

Dalam penelitian ini akan dilandaskan pada tipologi yang dirumuskan oleh Sidney Tarrow mengenai karakteristik fundamental sebuah gerakan. Sebuah gerakan sosial haruslah memanifestasikan aksi kolektif yang bersifat konfrontatif atau menantang terhadap pemegang otoritas, kelompok elite, maupun hegemoni norma budaya yang berlaku. Aktivitas tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan harus didasarkan pada artikulasi tuntutan bersama yang ditujukan secara spesifik kepada pihak berwenang atau pihak lawan. Lebih lanjut, kekuatan penggeraknya berakar pada soliditas identitas kolektif dan ikatan solidaritas yang kuat di antara para anggotanya. Terakhir, seluruh rangkaian aksi tersebut harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, hingga pada akhirnya bertransformasi menjadi sebuah entitas gerakan yang memiliki struktur organisasi yang lebih mapan (Tarrow, 1993).

Intervensi Almumtaz dalam Ruang Bermusik 2025 merupakan aksi kolektif terencana yang menargetkan pembatalan penampilan musisi seperti Hindia, Lomba Sihir, dan Feast karena dinilai membawa simbolisme yang bertentangan dengan akidah serta norma lokal Kota Santri. Jauh dari sekadar kritik pasif, Almumtaz memosisikan diri sebagai benteng moral yang menggunakan kekuatan mobilisasi massa sebagai instrumen penekan terhadap Pemerintah Kota dan Polres Tasikmalaya. Strategi ini menunjukkan pola aktivisme yang cerdas, di mana keberatan ideologis dibungkus dengan narasi penjagaan marwah daerah guna mengguncang dominasi budaya populer yang dianggap menyimpang di ruang publik.

Secara teknis, Almumtaz memanfaatkan celah administratif terkait ketidaklengkapan perizinan penyelenggara kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat sebagai instrumen legal untuk

memperkuat daya tawar mereka. Dengan menggeser perdebatan dari konflik nilai ke ranah kepatuhan hukum, mereka berhasil memperoleh legitimasi formal birokrasi tanpa harus terlihat anti-seni secara keseluruhan. Pola intervensi ini memperlihatkan kemampuan Almumtaz dalam mengonstruksi wacana yang mengawinkan penjagaan identitas religius dengan tekanan administratif, sehingga tuntutan mereka memiliki dasar yang kuat di mata otoritas sekaligus efektif dalam membendung pengaruh budaya yang dianggap tidak sejalan dengan standar akidah kelompok.

Almumtaz mengartikulasikan tuntutan kolektifnya dengan mendesak Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk mengevaluasi penampilan musisi seperti Hindia dan Lomba Sihir berdasarkan Perda Tata Nilai. Tuntutan ini mentransformasi sentimen keagamaan menjadi instrumen hukum formal, di mana identitas "Kota Santri" tidak lagi sekadar simbol budaya, melainkan landasan yuridis untuk mengawal izin keramaian dan konten pertunjukan di ruang publik. Dengan memosisikan diri sebagai otoritas pengawas, Almumtaz menuntut agar setiap ekspresi seni yang hadir di Tasikmalaya wajib selaras dengan standar akidah dan marwah daerah yang telah diformalkan dalam regulasi daerah.

Secara internal, kekuatan gerakan ini bersumber pada identitas kolektif dan solidaritas emosional-ideologis yang kuat di antara berbagai organisasi konservatif seperti Majelis Mujahidin, Jamaah Ansharu Syariah, dan Brigade Thaliban. Identitas ini terbentuk melalui interaksi rutin dan pengalaman aksi massa yang sama, sehingga menciptakan ikatan "tanggung jawab moral" untuk menjaga daerah dari infiltrasi budaya luar yang dianggap menyimpang. Solidaritas ini memungkinkan Almumtaz menyatukan berbagai elemen ormas Islam dan pesantren menjadi sebuah wadah formal yang terorganisir, disiplin, dan mampu memobilisasi massa dalam skala besar untuk mengintervensi dinamika sosial-politik lokal.

Karakteristik gerakan Almumtaz juga ditandai dengan konsistensi aksi berkelanjutan yang melampaui protes sesaat, di mana aliansi ini berfungsi sebagai instrumen pengawasan permanen terhadap implementasi kebijakan publik. Melalui koordinasi sistematis dengan Forkopimda dan aparat penegak hukum, Almumtaz secara aktif memosisikan masyarakat lokal sebagai "tuan rumah" yang berhak menentukan filter terhadap modernitas dan budaya populer. Dengan demikian, intervensi terhadap perhelatan Ruang Bermusik 2025 merupakan perwujudan dari strategi jangka panjang untuk memastikan bahwa perubahan global tetap tunduk pada fondasi nilai-nilai lokal dan kedaulatan budaya Kota Tasikmalaya.

Untuk membedah tujuan penelitian yang kedua, kajian ini menggunakan perspektif Porta dan Diani yang memandang identitas kolektif sebagai proses dinamis yang lahir dari keselarasan nilai dan pandangan hidup bersama, di mana bagi Almumtaz, identitas "Kota Santri" merupakan kristalisasi dari akar sejarah pesantren dan otoritas ulama yang menjadi kompas moral di ruang publik. Identitas ini bukan sekadar warisan statis, melainkan komitmen moral yang dimanifestasikan melalui gaya hidup religius dan sikap kritis terhadap budaya populer, guna memastikan bahwa marwah Tasikmalaya tetap terjaga dari pengaruh luar yang dianggap tidak patut secara etika. Melalui internalisasi nilai yang kuat, Almumtaz berhasil mentransformasikan sentimen keagamaan menjadi solidaritas ideologis yang solid dalam menghadapi tantangan perubahan zaman.

Identitas religius tersebut telah memiliki legitimasi yuridis melalui Perda Tata Nilai, yang memberikan dasar hukum bagi Almumtaz untuk menjalankan fungsi pengawasan dan intervensi secara resmi di tengah dinamika sosial, sehingga identitas keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai simbol kultural, tetapi juga sebagai instrumen politik dalam mengatur ruang

publik (Sulaeman, 2022). Dalam konteks Ruang Bermusik 2025, Almumtaz memposisikan diri sebagai "penyaring budaya" yang menggunakan identitas lokal sebagai filter ideologis untuk menjaga sterilitas ruang publik dari konten yang dianggap menyimpang secara akidah. Dengan demikian, arah gerakan mereka bukan sekadar aksi protes situasional, melainkan upaya proaktif untuk merestorasi moralitas publik dan memastikan bahwa ekspresi seni generasi muda tetap selaras dengan kedaulatan budaya serta prinsip kemaslahatan umat di Kota Tasikmalaya.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai operasional Almumtaz dalam Ruang Bermusik 2025, dapat disimpulkan bahwa aliansi ini berfungsi sebagai gerakan sosial terencana yang mentransformasikan keresahan moral menjadi tuntutan administratif formal kepada pihak berwenang. Kekuatan operasionalnya bersumber dari soliditas identitas kolektif ormas-ormas Islam yang terintegrasi secara organik, di mana mereka memanfaatkan instrumen legal berupa Perda Tata Nilai Nomor 7 Tahun 2014 untuk memberikan legitimasi pada setiap aksi penolakan. Melalui pengawasan berkelanjutan, Almumtaz memastikan bahwa setiap kegiatan publik berskala besar di Tasikmalaya harus melewati filter moralitas organisasi guna membendung narasi budaya populer yang dianggap menyimpang dari akidah.

Dalam upaya mempertahankan identitas Kota Santri, Almumtaz mentransformasikan narasi sejarah pesantren dan peran ulama menjadi identitas kolektif yang dinamis melalui pembangunan sense of belonging yang kuat di antara anggotanya. Identitas ini termanifestasi dalam konsistensi sikap dan standar evaluasi yang serupa terhadap fenomena sosial, seperti pada kasus konser musik, yang dipandang sebagai ujian terhadap prinsip moralitas daerah. Dengan mengintegrasikan pandangan hidup religius ke dalam kerangka yuridis, Almumtaz berhasil mengubah sentimen moral menjadi kekuatan hukum yang sah, sehingga identitas Kota Santri tetap relevan dan dominan sebagai benteng pertahanan terhadap gempuran budaya populer yang dianggap destruktif.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

6. Pernyataan *Conflicting Interests*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini

References

- Azhar, L. I. P., & Haryanto, B. (2024). Keberadaan pondok pesantren terhadap masyarakat sekitar. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(1), 443-452. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i1.4490>
- Badan Pusat Statistik. (2024, June 5). *Number of Islamic boarding school, students and teachers by district in Tasikmalaya municipality, 2024*.

- Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (3rd ed.). Sage Publications.
- Damantu, S. E., & Arief, M. (2025). Gerakan sosial masyarakat: Aksi kolektif masyarakat Desa Lembobelala dalam menolak klaim lahan oleh PT. Perkebunan Nusantara XIV. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 19-33. <https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/reinventing/id/article/view/2152>
- Detikjabar. (2025, July 16). Fix! Hindia batalkan manggung di Ruang Bermusik Tasikmalaya. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-8014318/fix-hindia-batalkan-manggung-di-ruang-bermusik-tasikmalaya>
- Detikpop. (2025, July 16). Hindia “selamatkan hidup” banyak orang sampai tudingan satanic. *Detik.com*. <https://www.detik.com/pop/music/d-8014310/hindia-selamatkan-hidup-banyak-orang-sampai-tudingan-satanic>
- DPRD Kota Tasikmalaya. (2020, July 11). Selayang pandang Kota Tasikmalaya. *DPRD Kota Tasikmalaya*. <https://dprd-tasikmalayakota.go.id/selayang-pandang-kota-tasikmalaya/>
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). Sage Publications.
- Hamim, M. (2021). Gerakan sosial Almumtaz dalam mengimplementasikan amar ma’ruf nahi munkar untuk pemberantasan kemaksiatan di Tasikmalaya (Disertasi). *Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati*.
- Kabar Priangan. (2025). Penampilan Hindia di Ruang Bermusik 2025 tuai polemik, ternyata bukan pertama kalinya konser di Tasikmalaya. *Kabar Priangan*. <https://kabarpriangan.pikiran-rakyat.com/kabar-priangan/pr-1489493991/penampilan-hindia-di-ruang-bermusik-2025-tuai-polemik-ternyata-bukan-pertama-kalinya-konser-di-tasikmalaya>
- KOMPAS.com. (2025, July 15). Konser Feast dan Hindia di Tasikmalaya diprotes, ormas tuduh bawa simbol satanic dan dajal. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/jawabarat/read/2025/07/14/110000188/konser-feast-dan-hindia-di-tasikmalaya-diprotes-ormas-tuduh-bawa>
- Mudzakkir, A. (2017). Konservatisme Islam dan intoleransi keagamaan di Tasikmalaya. *Harmoni*, 16(1), 57-74. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v16i1.56>
- Mujahidin, I. (2021). Peran pondok pesantren sebagai lembaga pengembangan dakwah. *Syiar: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 1(1), 31-44. <https://doi.org/10.54150/syiar.v1i1.33>
- News Tasikmalaya. (2025). “Kudoakan kita semua masuk neraka” lirik lagu Hindia yang tuai pro-kontra jelang konser Ruang Bermusik di Tasikmalaya. *News Tasikmalaya*. <https://www.newstasikmalaya.com/kudoakan-kita-semua-masuk-neraka-lirik-lagu-hindia-yang-tuai-pro-kontra-jelang-konser-ruang-bermusik-di-tasikmalaya>

- Priangan.com. (2025, July 14). PMII soroti perda tata nilai: Akar polemik konser musik ada di produk DPRD. *Priangan.com*. <https://priangan.com/pmii-soroti-perda-tata-nilai-akar-polemik-konser-musik-ada-di-produk-dprd/>
- Riadi, R., & Drajat, D. (2019). Analisis framing gerakan sosial: Studi pada gerakan aksi bela Islam 212. *Holistik: Journal for Islamic Social Sciences*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.24235/holistik.v3i1.5562>
- Rosyidah, I., & Damastuti, R. I. (2023). Membingkai identitas kolektif berbasis agama: Pengalaman gerakan Indonesia tanpa pacaran. *Dialog*, 46(2), 203–214. <https://doi.org/10.47655/dialog.v46i2.806>
- Sujarweni, V. W. (2025). *Metode penelitian*. Pustaka Baru Press.
- Sulaeman, E. (2022). *Politik identitas dalam perspektif al-Qur'an dan teori modern*. Pustaka Al-Kautsar.
- Tarrow, S. G. (1994). *Power in movement: Social movements and contentious politics (Rev. ed.)*. Cambridge University Press.
- Times Indonesia. (2025). Simbol ruang inklusif dan toleransi konser musik di Kota Tasikmalaya akhirnya mendapat izin resmi usai dialog damai. *Times Indonesia*. <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/546639/simbol-ruang-inklusif-dan-toleransi--konser-musik-di-kota-tasikmalaya-akhirnya-mendapat-izin-resmi-usai-dialog-damai>
- Wiktorowicz, Q. (2007). *Aktiwisme Islam: Pendekatan teori gerakan sosial*. Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods (6th ed.)*. Sage Publications.